

**PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI  
VARIABLE MODERATING PADA KECAMATAN TEBING  
SYAHBANDAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : TRI ANDINI BR SINAGA**  
**NPM : 1905170105**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : TRIANDINI BR-SINAGA  
N P M : 1905170105  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., AK., CA., CPA)

Pembimbing

(M. Firza Alpi, SE., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si., M.M.A.)



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TRI ANDINI BR SINAGA

N.P.M : 1905170105

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING PADA KECAMATAN TEBING  
SYAHBANDAR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi.

Medan, 21 Desember 2023

Pembimbing Skripsi

(M. FIBZA ALPI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



Dr. H. ANNURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tri Andini Br Sinaga  
IPM : 1905170105  
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, S.E., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating pada Kecamatan Tebing Syahbandar

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- deskripsi - fenomena penelitian.	2/08/2023	
Bab 2	- kaitan literatur - penelitian	2/08/2023	
Bab 3	- Metodologi - Populasi dan Sampel	01/10/2023	
Bab 4	- pembahasan. - yg di buatkan oos ppeleus - yg di justifikasi	21/11/2023	
Bab 5	- Kesimpulan	21/11/2023	
Daftar Pustaka	- Mendeleus.	7/12/2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc meja hijau	7/12/2023	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 07 Desember 2023

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
NPM : 1905170105  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating Pada Kecamatan Tebing Syahbandar

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Des 2023

Yang membuat pernyataan



Tri Andini Br Sinaga

## ABSTRAK

### **PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABLE MODERATING PADA KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR**

**TRI ANDINI BR SINAGA**  
**NPM. 1905170105**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [andinidyn133@gmail.com](mailto:andinidyn133@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating pada Pada Kecamatan Tebing Syahbandar secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pada Kecamatan Tebing Syahbandar yang jumlahnya 10 desa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang berjumlah 40 orang pada Pada desa yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Tata Kelola berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pengendalian Internal tidak memoderating Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan. Dan Pengendalian Internal Tidak Memoderating Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan P pada Pada Kecamatan Tebing Syahbandar.

***Kata Kunci* : Tata Kelola, Budaya Organisasi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pengendalian Internal**

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF GOVERNANCE AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH AN INTERNAL CONTROL SYSTEM AS A MODERATION VARIABLE IN TEBING SYAHBANDAR DISTRICT**

**TRI ANDINI BR SINAGA**  
**NPM. 1905170105**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [andinidyn133@gmail.com](mailto:andinidyn133@gmail.com)

*The aim of this research is to test and analyze the influence of Governance and Organizational Culture on Accountability in Village Fund Management with Internal Control as a Moderating Variable in Tebing Syahbandar District directly and indirectly. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study were all employees in Tebing Syahbandar District, a total of 10 villages. The sample in this study used saturated sampling, totaling 40 people in villages in Tebing Syahbandar District. Data collection techniques in this research used observation techniques and questionnaires. The data analysis technique in this research uses a quantitative approach using statistical analysis using Auter Model Analysis, Inner Model Analysis and Hypothesis Testing. Data processing in this research uses the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this research prove that governance directly has a significant effect on the accountability of village fund management. Organizational culture has a significant influence on the accountability of village fund management. Internal Control does not moderate Governance towards Accountability of Village Fund Management. And Internal Control Does Not Moderate Organizational Culture on the Accountability of Village Fund Management with P in Tebing Syahbandar District.*

**Keywords: Governance, Organizational Culture, Accountability for Village Fund Management and Internal Control**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variable Moderating Pada Kecamatan Tebing Syahbandar”**

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus dan istimewa kepada orang tua saya **Zulkifli Sinaga** dan Ibunda **Darmawati** serta Orang tua angkat saya Nazrah Tercinta yang penuh kasih dan sayang yang telah memberikan Dukungan, Doa, Semangat dan Dana kepada saya selama menyelesaikan studi di UMSU.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah seleyaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **M. Firza Alpi SE, M.Si** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Para Staff Pegawai Di Kecamatan Tebing Syahbandar Yang Telah Memberikan Izin Tempat Riset Dan Dukungan Kepada Penulis Sehingga Skripsi Ini Dapat terselesaikan Dengan Tepat Waktu.

10. Kepada Saudara Kandung Penulis, Kakak Juni Anda Rini S.Pd Dan Ade Syafira Lukmana Lubis S.P Dan Abang Muhammad Said Sinaga S.P Serta Adik Popi Indriani Sinaga.
11. Kepada Sahabat Sejati Saya Meilani, Defi Purnamawati Saragih Yang Telah Memberikan Hiburan Dan Motivasi Dalam Melakukan Pembuatan Proposal Ini.
12. Kepada Teman-Teman Saya Mutiara Maisarah Lubis, Diwa Ayu Apridilla, Nursalmah Br Siagian Serta Seluruh Teman-Teman Kelas C Akuntansi Pagi Dan Kelas D Akuntansi Malam Stambuk 2019 Yang Telah Mendukung Dan Mendoakan Penulis Dalam Melakukan Pembuatan Proposal Ini.

Dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga Skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Amin Ya Rabbal'alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, November 2023  
Penulis

**TRI ANDINI BR SINAGA**  
**NPM 1905170105**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Uraian Teoritis .....	12
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) .....	12
2.1.1.1. Pengertian Teori Keagenan (Agency Theory) .....	12
2.1.2. Tata Kelola .....	14
2.1.2.1. Pengertian Tata Kelola .....	14
2.1.2.2. Prinsip-prinsip Tata Kelola .....	15
2.1.2.3. Indikator Tata Kelola .....	16
2.1.3. Budaya Organisasi .....	16
2.1.3.1. Pengertian Budaya Organisasi .....	16
2.1.3.2. Fungsi Budaya Organisasi .....	17
2.1.3.3. Karakteristik Budaya Organisasi .....	18
2.1.3.4. Peranan Budaya Organisasi .....	19
2.1.3.5. Indikator Budaya Organisasi .....	21
2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	21
2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas .....	21
2.1.4.2. Pengelolaan Dana Desa .....	23
2.1.4.3. Asas Pengelolaan Dana Desa .....	29
2.1.4.4. Prinsip Pengelolaan Dana Desa .....	31
2.1.4.5. Faktor2 Penghambat Pengelolaan Dana Desa .....	31

2.1.4.6. Indikator Pengelolaan Dana Desa .....	32
2.1.5. Sistem Pengendalian Intern.....	33
2.1.5.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	33
2.1.5.2. Komponen Sistem Pengendalian Intern .....	34
2.1.5.3. Tujuan Dan Manfaat Sistem Pengendalian Intern .....	36
2.1.5.4. Indikator Sistem Pengendalian Intern .....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	40
2.3 Kerangka Konseptual .....	41
2.4 Hipotesis .....	45
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	47
3.2 Definisi Oprasional .....	47
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
3.4 Populasi dan Sampel .....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	58
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian .....	58
4.1.2 Identitas Responden .....	58
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian .....	60
4.1.4 Analisis Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	67
4.1.5 Analisis Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	70
4.1.6 Koefisien Determinasi ( <i>R Square</i> ) .....	72
4.2. Pembahasan .....	76
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1. Kesimpulan .....	81
5.2. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa 2021-2022.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1 Indikator Variabel .....	48
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	49
Tabel 3.3 Populasi .....	50
Tabel 3.4 Skala Pengukuran .....	52
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	58
Tabel 4.2 Umur Responden .....	59
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden .....	59
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden .....	60
Tabel 4.5 Skor Angket Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	61
Tabel 4.6 Skor Angket Sistem Pengendalian Intern .....	62
Tabel 4.7 Skor Angket Tata Kelola.....	63
Tabel 4.8 Skor Angket Budaya Organisasi .....	64
Tabel 4.9. Validitas dan Realibilitas Konstruk.....	67
Tabel 4.10. Validitas Konvergen .....	68
Tabel 4.11. Validitas Diskriminan .....	69
Tabel 4.12.Kolineiritas .....	71
Tabel 4.13. Koefisien Determinasi .....	72
Tabel 4.14. Hipotesis Pengaruh langsung.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	45
Gambar 4.1 PLS Algoritma.....	67
Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
Kuisisioner .....	1
Tabulasi Kuisisioner .....	2
Tabel Validitas dan Realibilitas Konstruk .....	3
Tabel Validitas Konvergen .....	4
Tabel Validitas <i>Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation</i> (HTMT).....	5
Tabel Kolinieritas.....	6
Tabel Pengujian Hipotesis .....	7
Tabel Koefisien Determinasi.....	8

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan kelurahan. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan desa.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun

pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa.

Tata kelola merupakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sikap dan prilakunya harus menerapkan *good governance* berarti pemerintah itu didasari pada prinsip-prinsip keikutsertaan, supremasi hukum, transparansi, kritis, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling berkaitan. Pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa perlu diwujudkan untuk pemerintah yang bersih, bermartabat dan akuntabel. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Tata kelola yang baik yakni melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa sesuai dengan aturan perundang-undangan (Ubaidillah & Arumsari, 2019).

Penerapan *good governance* sangat penting dilakukan melihat banyaknya tekanan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintahan guna melaksanakan kegiatan penyelenggaraan yang efektif, sehingga pemerintah dalam mengatasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat perlu membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif.

Budaya organisasi merupakan suatu nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya,

yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasinya (Nurviasari, 2016). Budaya organisasi sangat berpengaruh dalam kinerja pemerintah desa, karena sistem nilai yang diterapkan di organisasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila budaya organisasi yang diterapkan baik maka akan lebih mudah bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

System pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa karena dalam setiap penyaluran dana desa seluruh pihak baik dari tingkat Kabupaten hingga Desa diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan baik sehingga penyelenggaraan dana desa dapat terorganisir secara maksimal (Budiarto et al., 2020). Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan keyakinan terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset-aset desa dan taatnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Tebing Syahbandar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan tersebut memiliki 10 Desa yaitu : Desa Bahilang, Binjai,

Kuta Pinang, Laut Tador, Paya Pasir, Paya Pinang, Penggalangan, Penggalian, Sibulan, Tanah Besih. Desa yang terluas yaitu Desa Laut Tador yang hampir seluruh wilayahnya merupakan daerah perkebunan, sedangkan desa yang terkecil wilayahnya adalah Desa Paya Pasir. Dengan luas seluruh wilayah 120,30 km<sup>2</sup> sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar adalah 5.759 Jiwa yang memperoleh anggaran dana desa di Pemerintah Pusat

**Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Pada Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2022**

<b>N O</b>	<b>Wilayah/ Desa</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Total Penyaluran ke RKD</b>	<b>Persentase Total Penyaluran</b>	<b>BLT Desa</b>	<b>Realisasi BLT (KPM) Jan-Des</b>
1	Penggalian	Rp. 825.070.000	Rp. 825.070.000	100%	Rp. 331.200.000	92
2	Laut Tador	Rp. 702.404.000	Rp. 702.040.000	100%	Rp. 295.200.000	82
3	Tanah Besih	Rp. 700.194.000	Rp. 258.046.000	50,59%	Rp .90.000.000	25
4	Binjai	Rp. 856.471.000	Rp.856.471.000	100%	Rp.345.600.000	96
5	Paya Pasir	Rp. 771.111.000	Rp.766.361.000	99,38%	Rp.309.600.000	86
6	Bahilang	Rp. 663.433.000	Rp.663.432.501	100%	Rp.266.400.000	74
7	Penggalan- Ngan	Rp. 967.986.000	Rp.967.677.104	99,97%	Rp.399.600.000	111
8	Paya Pinang	Rp. 836.304.000	Rp.836.304.000	100%	Rp. 334.800.000	93
9	Kuta Pinang	Rp. 816.637.000	Rp.816.627.000	100%	Rp. 327.600.000	91
10	Sibulan	Rp. 679.264.000	Rp.679.264.000	100%	Rp.273.600.000	76
		<b>Rp 7.818.874.000</b>	<b>Rp. 7.371.657.165</b>	<b>19,00%</b>	<b>Rp. 2.973.600.000</b>	<b>826</b>

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id/>

Dari Tabel 1.1 Dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa di Kecamatan Tebing Syahbandar di Tahun 2021-2022 Total pagu anggaran sebesar Rp 7.818.874.000, dan dari beberapa desa di Kecamatan Tebing Syahbandar jumlah dana desa yang tertinggi di peroleh oleh Desa Penggalangan yakni sebesar Rp 967.986.000, yang merupakan desa yang mendapatkan jumlah dana terbesar atau dapat dikatakan desa yang mendapatkan dana yang paling banyak dibandingkan

dengan desa lainnya. Sedangkan jumlah dana desa yang terendah diperoleh oleh Desa Bahilang Rp 663.433.000. Diketahui setiap tahunnya total BLT Desa yang disalurkan kepada seluruh masyarakat yang sudah terdata setiap desanya sebesar Rp 2.973.600.000. Adapun jumlah penerima KPM BLT Desa yang disalurkan di Kecamatan Tebing Syahbandar berjumlah 826 orang yang tiap bulannya disalurkan sebesar Rp 300.000 per KPM. Berdasarkan dari hasil Total presentase penyaluran dapat dilihat salah satu desa yang memiliki presentase terendah 50,59%. Hal ini disebabkan adanya pemotongan dana desa dari pemerintahan pusat dikarenakan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa tanah besi (Medan.tribunnews.com), maka besar pagu anggaran tidak sama dengan total penyaluran ke rekening kas desa (RKD).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada System pengendalian internal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan serta kurangnya koordinasi pimpinan daerah. System pengendalian internal pemerintah (SPIP) diindikasi bisa memengaruhi tingkat korupsi suatu lembaga pemerintahan. Rendahnya system pengendalian internal yang diterapkan akan menjadi potensi penyimpangan pada aspek finansial seperti korupsi (Tirtawirya et al, 2017). Pengendalian internal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam aktivitas disuatu instansi pemerintahan. Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan atau kecurangan dalam pengamanan asset Negara. Selain itu dapat meningkatkan ketelitian dan mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan suatu instansi. Atas berbagai kelemahan

tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan Negara/daerah yang efektif, efisien, efesiensi, transparansi dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa unsur system pengendalian intern pemerintah ada 5 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara (BPK, 2014). Saat ini dana desa akan langsung diperiksa BPK bukan inspektorat lagi. Jadi, sangat penting untuk kantor desa di kecamatan tebing syahbandar untuk menerapkan system pengendalian intern pemerintah terutama masih ada yang belum menerapkan peraturan pemerintah ini.

Namun permasalahan lain yang ditemukan di desa Kecamatan Tebing Syahbandar terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2021-2022 diduga salah satu kepala desa tidak adanya keterbukaan informasi public (Gatanews.id, 2022). Dan masyarakat yang kurang apatis terhadap proses pengelolaan dana desa karena faktor pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa mengenai program dana desa kepada masyarakat yang dapat dilihat dari perwujudan pemberdayaan dalam definisi pemerintah mampu melihat bagaimana kondisi masyarakat di daerahnya, dan juga kesenjangan hubungan masyarakat terhadap

perangkat desa karea tidak memiliki kesempatan waktu yang sama. Untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang sehat, partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa sangat dibutuhkan. Dana desa yang sehat, menjadi jalan untuk menuju desa berdaya, mandiri, dan sejahterah.

Dengan anggaran dana desa yang cukup besar, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa juga besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan serta pengelolaan dana desa. Dimana semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan (Puspa & Prasetyo, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Kristini et al., 2020). Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam program yang akan dilaksanakan, memastikan tercapainya tujuan pemerintah serta ikut dalam melaksanakan tujuan guna menciptakan masyarakat yang dinamis dan sejahtera. Dengan terwujudnya *Good governance* dalam tata kelola dana desa akan terwujudnya pembangunan desa yang berdayaguna bagi kepentingan dan kemajuan desa. Pembangunan sebagai aspek penting dalam mendorong masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Hawa, Agus Sudrajat, et al., 2021) namun memiliki perbedaan pada lokasi

penelitian dan jumlah respondennya dan permasalahan yang berbeda pula yang ditemukan dilokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat **“Pengaruh Tata Kelola Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan System Pengendalian Intern Sebagai Variabel Modern Pada Kecamatan Tebing Syahbandar**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran tidak sama dengan total penyaluran ke rekening kas desa (RKD)
2. Masih terdapat kelemahan system pengendalian intern pada desa kecamatan tebing syahbandar
3. Tidak adanya keterbukaan informasi public terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2021-2022
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa mengenai progam dana desa kepada masyarakat.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji variabel Tata kelola dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam system pengendalian intern.
2. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah hanya menunjukkan kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar ?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar ?
3. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan system pengendalian intern pada kecamatan tebing syahbandar sebagai variabel Moderating ?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan system pengendalian intern pada kecamatan tebing syahbnadar sebagai variabel Moderating ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar
3. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan system pengendalian intern pada kecamatan tebing syahbandar sebagai variabel Moderating

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan system pengendalian intern pada kecamatan tebing syahbandar sebagai variabel Moderating.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan

akuntansi sektor publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (Agency Theory) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Septiani et al., 2019). Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu seorang principals/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah/agent untuk mengelola dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut (Menurut Jensen dan Meckling, 1976) theory agency didasarkan pada kesepakatan bersama atas kontrak kerja antara agent dan principal. Bukan hanya digunakan untuk sebuah perusahaan, teori ini juga dapat diterapkan dalam organisasi public. (Bergman & Lane, 1990) memberikan argument bahwa hubungan principal-agent adalah suatu kedekatan yang untuk menganalisis komitmen kebijakan public. Menurut (Tamara & Konde, 2016), akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agensi/pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban kepada pihak pemberi amanah (principal masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas 2 macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntabilitas Vertical), dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntabilitas Horizontal). Pada organisasi sektor public yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## **2.1.2. Tata Kelola**

### **2.1.2.1. Pengertian Tata Kelola**

Tata kelola (*governance*) merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari tata kelola baik internal maupun eksternal. Tata kelola desa berkaitan dengan pengelolaan yang sudah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan di tingkat desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Penataan desa yang baik bertujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan,

partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah.

#### **2.1.2.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola**

Prinsip tata kelola mengacu kepada *good governance* yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat semua penduduk memiliki hak dan kewajiban dalam menempatkan bagian dalam proses bernegara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
2. Penegakan hukum tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil tanpa membedakan siapa yang dilayani.
3. Transparansi keterbukaan informasi merupakan salah satu lambing tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Daya tanggap merupakan kemampuan dalam menerima keluhan dari para pemangku kepentingan.

5. Consensus dalam menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan dan menggunakan system musyawarah.
6. Akuntabilitas merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk tanggung jawab yang jelas.

Dengan demikian, prinsip-prinsip diatas sangat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, professional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan pada masyarakat.

### **2.1.2.3. Indikator Tata Kelola**

Upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, variabel tata kelola menggunakan indicator sebagai berikut :

1. Tranparansi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas
4. Koordinasi

### **2.1.3. Budaya Organisasi**

#### **2.1.3.1. Pengertian Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi, suatu system tentang kebersamaan (Sari et al., 2021).

Sedangkan yang memberikan argument bahwa budaya organisasi merupakan sebuah asumsi atau system keyakinan, nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah dalam perubahan eksternal maupun internal (Tangkeallo & Kannapadang, 2020). Budaya organisasi sebagai suatu system pemahaman bersama yang di anut oleh anggota organisasi yang membedakannya dari organisasi lain (Maulana, 2020). Budaya organisasi merupakan system nilai organisasi yang akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku (Napitupulu & Medina, 2012). Budaya organisasi juga digunakan untuk mengarahkan para anggota organisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja serta memberikan motivasi suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain.

#### **2.1.4.2. Fungsi Budaya Organisasi**

Fungsi budaya organisasi menurut (Maulana, 2020) yaitu :

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.
2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.

4. Budaya merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.
5. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

### **2.1.3.3. Karakteristik Budaya Organisasi**

Tujuh karakteristik primer budaya organisasi menurut (Robbins & Judge, 2021) sebagai berikut :

1. Inovasi dan mengambil resiko yaitu sejauh mana karyawan diharapkan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko.
2. Perhatian terhadap detail yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detil.
3. Orientasi pada hasil yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
4. Orientasi pada manusia yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi.
5. Orientasi pada tim yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja diorganisasikan pada tim ketimbang individu-individu.
6. Agresivitas yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai.
7. Stabilitas yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekan dipertahankannya status quo dalam perbandingan dengan pertumbuhan.

#### **2.1.3.4 Peranan Budaya Organisasi**

Peranan budaya organisasi memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi, khususnya kinerja organisasi, khususnya kinerja karyawan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mana peranan organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasional nya dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan organisasi.

Peranan budaya organisasi menurut (Wirawan, 2015) sebagai berikut :

1. Identitas Organisasi

Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada orang diluar organisasi.

2. Menyatukan Organisasi

Budaya organisasi merupakan iem normative yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma atau nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengoordinasi anggota organisasi.

3. Reduksi Konflik

Pola piker, asumsi, dan filsafah organisasi yang sama memperkecil perbedaan dan terjadi konflik, budaya organisasi mempunyai cara untuk menyelesaikan.

4. Komitmen Kepada Organisasi dan Kelompok

Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya.

Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya.

#### 5. Reduksi Ketidakpastian

Budaya organisasi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian. Budaya organisasi menentukan kemana arah, apa yang akan dicapai, dan bagaimana mencapainya.

#### 6. Menciptakan Konsistensi

Budaya organisasi menciptakan konsistensi berfikir, berperilaku, dan merespons lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola memproduksi dan melayani konsumen, pelanggan, nasabah, atau klien organisasi.

#### 7. Motivasi

Budaya organisasi memotivasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, mereka juga memotivasi untuk menggunakan perilaku dan cara tertentu, yaitu cara yang dapat diterima oleh budaya organisasi.

#### 8. Kinerja Organisasi

Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan memotivasi kerja karyawan.

#### 9. Keselamatan Kerja

Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap keselamatan kerja. Untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

#### 10. Sumber Keunggulan Kompetitif

Budaya organisasi merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektifitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan.

#### **2.1.3.5 Indikator Budaya Organisasi**

Menurut (Robbins & Judge, 2021), Budaya Organisasi adalah persepsi bersama dari para anggota tersebut. Variabel budaya organisasi pada penelitian ini diukur berdasarkan teori Robbins dan Coulter, yang dituangkan dalam 5 (lima) indikator sebagai berikut

1. Inovasi & Pengambilan Resiko
2. Orientasi Tim
3. Orientasi Hasil
4. Kemantapan
5. Keagresifan

#### **2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

##### **2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Sujarweni, 2015) dalam bukunya Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa mengemukakan definisi akuntabilitas sebagai berikut : Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk bertanggungjawab atas setiap kegiatan dalam hal mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diamanatkan kepadanya guna mencapai tujuan (Irfan et al., 2022). Dalam pasal 7 undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan juga hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah segala bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik membutuhkan system akuntabilitas yang berarti kinerja pemerintahan tingkat desa mulai dari perencanaan untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, bertanggung jawab kepada pemerintah dan aparatur desa, serta melaporkan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan perundang-undangan. (Putra et al., 2018) Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan public. Akuntabilitas mencakup dua jenis yaitu akuntabilitas vertical

(*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) (Ningsih et al., 2020).

#### **2.1.4.2 Pengelolaan Dana Desa**

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Hanum, 2011). Perencanaan pengelolaan keuangan desa di artikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan juga belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang, dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud berarti tentang perencanaan keuangan desa yaitu penyusunan APBDesa.

Penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang memiliki kekuatan hukum.

RKPDesa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Tangkaroro et al., 2017).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- h. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

- j. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- k. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara dan Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara Desa merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan di tingkat desa. Penatausahaan desa dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Penatausahaan Pendapatan (Penerimaan)

Dalam penatausahaan penerimaan pendapatan desa, bendahara membuat dokumen yaitu buku kas umum, buku kas harian pembantu, dan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.

- b. Penatausahaan Belanja (Pengeluaran)

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Perdes tentang APB Desa atau Perdes tentang Perubahan APB Desa melalui

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

- c. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Bendahara
- d. Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

#### **2.1.4.3. Asas Pengelolaan Dana Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Transparan**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Sinambela et al., 2018). Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan ini dipahami oleh informan (Kades, Sekdes, Bendahara atau kaur/kasi) sehingga langkah nyata yang dilakukan dengan memasang APBDes agar dapat diketahui program kegiatan desa dan juga anggaran yang akan dikeluarkan sehingga bisa adanya monitoring dari masyarakat terhadap pelaksanaannya (Widayanti et al., 2019).

##### **2. Akuntabel**

Akuntabel yaitu sebagai perwujudan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pengendalian, disini dipahami oleh informan sehingga dilakukan pelaporan keuangan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran, walaupun masih ada kendala karena belum paham aturan yang baru dan sering mengalami perubahan. Menurut (Widayanti et al., 2019) pentingnya kompetensi diperlukan sebagai upaya mendukung dalam melakukan pelaporan yang akuntabel.

### 3. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Menurut (Widayanti et al., 2019) Partisipatif sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. Dalam konsep ini partisipatif sudah dipahami dibuktikan melalui melibatkan peran aktif masyarakat dari tingkat dusun, RT, RW, lembaga desa, BPD, LPM, PKK, KPMD, tokoh masyarakat dan juga disabilitas walaupun ada beberapa desa yang belum melibatkan secara keseluruhan namun konsep partisipatif sudah dilaksanakan.

### 4. Tertib Dan Disiplin Anggaran

Tertib dan Disiplin, artinya dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang berlaku atau yang melandasinya (Widayanti et al., 2019). Aturan mengenai pengelolaan keuangan juga mulai dipahami oleh informan, yang dilakukan informan dalam penyampaian pelaporan berusaha untuk tertib dan disiplin walaupun adanya aturan baru pembenahan

Permendagri No.20 tahun 2018 yang melengkapi kekurangan yang ada di Permendagri No. 113 tahun 2014.

#### **2.1.4.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Sari, 2021), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

#### **2.1.4.5 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Saragih & Parlina, 2021) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan

2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat.

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

#### **2.1.4.6 Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan dana desa dengan tepat sasaran
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDesa
3. Penatausahaan atau pembukuan dana desa yang sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota

4. Pelaporan pengelolaan dana desa kepada Bupati/Walikota
5. Pertanggungjawaban kepala desa atas realisasi APBDesa.

### **2.1.5 Sistem Pengendalian Intern**

#### **2.1.5.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Internal. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision (COSO) dikutip dalam (Sujarweni, 2015), pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari serangkaian proses dalam organisasi. Pengendalian internal masuk dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut (Jones et al., 2020), sistem pengendalian internal meliputi berbagai teknik, prosedur dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk mendapatkan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien juga dapat diandalkan, sehingga manajemen mendapatkan bantuan dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan.

Menurut (Rokhlinsari & Hidayat, 2016) Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan. Sedangkan menurut (Nainggolan, 2018) pengendalian internal ialah merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur dalam melindungi aset/kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, serta menjamin tersedianya akan informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau

apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal adalah sebuah kegiatan berdasarkan rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan anggota lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **2.1.5.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission dikutip dalam (Butler et al., 2020), kerangka kerja pengendalian internal berfokus pada lima komponen yang terpadu yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian menggambarkan serangkaian standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Penilaian risiko.

Penilaian risiko bertujuan membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Penilaian risiko membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan di lingkungan internal dan eksternal dalam mengambil tindakan untuk mengelola dampak tersebut.

3. Aktivitas pengendalian.

Aktivitas pengendalian adalah tindakan (umumnya dijelaskan dalam kebijakan, prosedur dan standar) yang membantu manajemen meminimalkan risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dapat bersifat preventif dan detektif serta dapat dilakukan disemua tingkatan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi.

Informasi diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi berdasarkan sumber internal dan eksternal digunakan untuk menyebarkan informasi penting di dalam ataupun di luar organisasi, sebagaimana diperlukan untuk merespon dan mendukung tujuan organisasi.

5. Kegiatan pemantauan.

Kegiatan pemantauan merupakan evaluasi berkala atau berkelanjutan untuk memastikan bahwa masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal termasuk pengendalian yang memengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen telah berfungsi.

### 2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Sistem Pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan dari pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2019) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut (Hermawan, 2019) tujuan sistem pengendalian internal ialah memberikan jaminan bahwa:

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

Menurut (Wiratna, 2017) tujuan perusahaan membuat system pengendalian internal adalah:

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi
2. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan
3. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen
4. Untuk menjaga ketepatan laporan keuangan perusahaan
5. Semua lapisan dalam perusahaan tunduk pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan perusahaan.
6. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperluan adanya sistem informasi akuntansi yang benar.

Hal ini dapat memberikan bantuan terhadap kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mendeteksi kesalahan kecil yang dapat ditimbulkan atas kebijakan – kebijakan baru yang telah ditetapkan. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

#### **2.1.5.4 Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Intern**

Menurut (Elder et al., 2021) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi

standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

#### 5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Selanjutnya menurut (Mulyadi, 2019) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	(Ubaidillah & Arumsari, 2019)	Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	(Hawa, Sudrajat, et al., 2021)	Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Desa Di Kabupaten Magetan)	Tata kelola tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.. Budaya organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh dalam meModerating tata kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3	(Natalia & Sujana, 2022)	Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan	Penelitian ini menemukan bahwa sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi berpengaruh positif pada pencegahan

		Pengelolaan Keuangan Desa	kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan tersebut secara praktis penelitian ini dapat berimplikasi bahwa pentingnya implementasi sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi yang baik untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan sehat guna melakukan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
4	(Syahrir et al., 2019)	Pengaruh budaya organisasi, system pengendalian intern, dan system keuangan daerah akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah System akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

			pemerintah
5	(Widyatama et al., 2017)	Pengaruh Kompetensi, System Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan ADD. System pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah variabel-variabel yang saling berhubungan antara variabel satu dengan variabel lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual digunakan untuk menghubungkan secara jelas tentang suatu topic yang akan dibahas untuk mengetahui secara jelas tentang suatu topic yang akan dibahas untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variabel terikat, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian intern dengan variabel bebas yaitu tata kelola, dan budaya organisasi.

#### 1. Pengaruh Tata kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif (Lubis et al., 2020).

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Nurdin & Wijaya, 2019)

Pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa perlu diwujudkan untuk pemerintah yang bersih, bermartabat bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola yang baik. Jika tata kelola baik atau tinggi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini disebabkan tata kelola pemerintahan desa baik, terkonsep, teratur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undang maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Astuty, 2016).

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dilakukan oleh (Ubaidillah & Arumsari, 2019) menunjukkan bahwa Tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Maryati, 2018) budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, sikap dan tradisi bersama dimana hal tersebut mengikat anggota organisasi sebagai acuan untuk bekerja dan berinteraksi sesama anggota. Budaya

organisasi merupakan system nilai organisasi yang akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku (Asriandi et al., 2018)

Terdapat tujuh karakteristik primer yang digunakan secara bersama dalam memahami hakikat dari budaya organisasi (Robbins & Judge, 2021) yaitu inovasi dan mengambil resiko, perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, agrefitas dan kemandapan. Dari budaya organisasi tersebut pengelolaan dana desa akan lebih akurat dan cepat dihasilkan. Jadi pengelolaan dana desa akan lebih berkualitas jika budaya organisasi memadai.

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dilakukan oleh (Syahrir et al., 2019) menunjukkan bahwa Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **3. Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan System Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating**

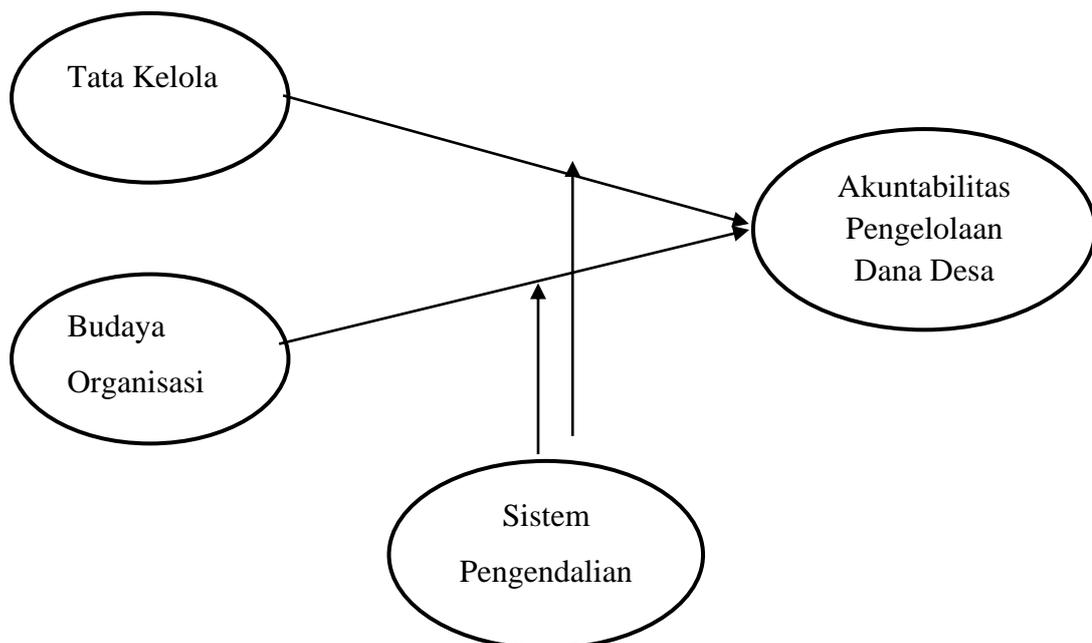
Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah melalui *good governance* (Usman et al., 2015). Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan di setiap organisasi, (Natalia & Sujana, 2022)

Tata kelola (governance) yang baik tidak terlepas dari akuntabilitas. Untuk itu, perlu adanya pengawasan untuk terhindar dari kesalahan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat berperan dalam memaksimalkan tata kelola (governance) (Hawa et al., 2021).

Hasil penelitian (Ramon, 2014) memberikan argument bahwa Sistem Pengendalian Intern dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah didorong oleh adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang sangat baik..

#### **4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan System Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating**

Budaya organisasi merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. Sehingga budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lain. Dalam organisasi, budaya organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi tersebut, karena budaya organisasi dapat merubah sikap seseorang dalam organisasi hanya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Perubahan perilaku tersebut dapat mempengaruhi system yang berada dalam organisasi tersebut. Sehingga budaya organisasi menjadi sangat penting dalam penerapan system pengendalian intern, karena untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik diperlukan system akuntansi keuangan daerah yang sistematis (Hawa, Sudrajat, et al., 2021).



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperbolehkan melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar.
2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar
3. Tata kelola dan system pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar
4. Budaya organisasi dan system pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tebing Syahbandar

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut menyatakan bahwa pendekatan asosiatif adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat. Yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya (Juliandi et al., 2018).

Menurut (Juliandi et al., 2018) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang permasalahannya tidak ditemukan diawal namun permasalahan tersebut akan ditemukan bila peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung, dan apabila peneliti menemukan permasalahan di lapangan maka permasalahan tersebut akan diteliti hingga menemukan solusi atau jawabannya.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Menurut (Juliandi et al., 2018). Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari variabel berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Pengukuran atau pengujian tersebut bisa dilihat dari indicator, kriteria, tolak ukur, alat ukur, alat uji untuk menentukan kualitas atau kuantitas suatu variabel. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Tata Kelola (X1)	<i>Good governance</i> sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik (Haryanto et al., 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi</li> <li>2. Partisipasi</li> <li>3. Akuntabilitas</li> <li>4. Koordinasi</li> </ol>	Likert
Budaya Organisasi (X2)	Budaya organisasi adalah persepsi bersama dari para anggota tersebut (Robbins & Judge, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi &amp; pengambilan resiko</li> <li>2. Orientasi tim</li> <li>3. Orientasi hasil</li> <li>4. Kemantapan</li> <li>5. Keagresifan</li> </ol>	Likert
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas public merupakan sebuah kewajiban seorang agent untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas yang telah diberikan oleh principal (Mardiasmo, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Penatausahaan</li> <li>4. Pelaporan</li> <li>5. Pertanggungjawaban</li> </ol>	Likert
System Pengendalian Intern (Variabel Moderating)	Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan (Astuty, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan pengendalian.</li> <li>2. Penilaian resiko.</li> <li>3. Kegiatan pengendalian operasional.</li> <li>4. Penyebaran komunikasi informasi pengendalian monitoring dan evaluasi pengendalian.</li> </ol>	Likert



### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar yang berjumlah 10 desa.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Populasi**

No	Nama Desa
1	Penggalian
2	Laut Tador
3	Tanah Besih
4	Binjai
5	Paya Pasir
6	Bahilang
7	Penggalangan
8	Paya Pinang
9	Kuta Pinang
10	Sibulan

#### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi

terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar yang berjumlah 10 desa.

Menurut (Sugiyono, 2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Menurut (Sugiyono, 2019) metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. menyatakan bahwa sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan setiap desa terwakili masing masing 4 orang yakni : Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR dan KASI. Maka jumlah sampelnya adalah 40 pada Kecamatan Tebing Syahbandar.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Daftar Pertanyaan (*Questioner*)**

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu di desa yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Skala Pengukuran**

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Memadai	5
Memadai	4
Kurang Memadai	3
Tidak Memadai	2
Sangat Tidak Memadai	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-

indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
  - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
  - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
  - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni
  - a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
  - b. f-square; dan
  - c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan

estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

### **3.6.1 Analisa Outer Model**

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

#### *1. Convergent Validity*

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

#### *2. Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted* (AVE).

### 3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

### 4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha  $> 0,7$ .

## 3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan

(*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

### **3.6.3 Uji Hipotesis**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $< 0,05$ .

### **3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural**

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

### **3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)**

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

#### **1. R-Square Test**

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square ( $r^2$ ) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015)

#### **2. Path Coefficient Test.**

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta

hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 5 pernyataan untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), 4 pernyataan untuk Sistem Pengendalian Intern (Z), 4 pernyataan untuk Tata Kelola (X1), dan 5 pernyataan untuk Budaya Organisasi (X2). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 40 orang responden Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

##### 4.1.2 Identitas Responden

###### 4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1.**  
**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	28	70 %
2	Perempuan	12	30 %
TOTAL		40	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 28 (70%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 12 (30%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada Perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar.

#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2**  
**Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	4	10,00 %
2	31 – 40 Tahun	8	20,00 %
3	41 - 50 Tahun	18	45,00 %
4	51 - 60 Tahun	10	25,00 %
TOTAL		40	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari perangkat desa yang berumur 21-30 tahun sebanyak 4 orang (10 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 8 orang (20 %), berumur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 18 orang (45%), dan yang berumur 51 - 60 tahun sebanyak 10 orang (25 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa yang berumur rentang waktu 41 sampai 50 tahun pada Perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar.

#### 4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3 Tingkatan Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	18	45,00 %
2	D3	6	15,00 %
3	S1	16	40,00 %
TOTAL		40	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan, pendidikan SMA sebanyak 18 orang (45

%), pendidikan D3 yaitu sebanyak 6 orang (15 %) dan pendidikan Strata-1 yaitu sebanyak 16 orang (40%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan SMA pada Perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar.

#### 4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

**Tabel 4.4**  
**Lama Bekerja Responden**

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 5 Tahun	11	27,50 %
2	6 - 10 Tahun	12	30,00 %
3	> 10 Tahun	17	42,50 %
TOTAL		40	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari perangkat desa yang lama bekerja < 5 tahun sebanyak 11 orang (27,50 %), lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 12 orang (30 %), lama bekerja lebih 10 tahun yaitu sebanyak 17 orang (42,5 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah perangkat desa yang bekerja lebih dari waktu 10 tahun pada Perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar

#### 4.1.3.Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Sistem Pengendalian Intern (Z),Tata Kelola (X1) dan Budaya Organisasi (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

#### 4.1.3.1 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Skor Angket Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

No	Financial Behavior (Y)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	32,5	17	42,5	10	25,0	0	0,0	0	0	40	100
2	12	30	18	45,0	10	25,0	0	0,0	0	0	40	100
3	14	35	19	47,5	7	17,5	0	0,0	0	0	40	100
4	14	35	17	42,5	9	22,5	0	0,0	0	0	40	100
5	11	27,5	19	47,5	10	25,0	0	0,0	0	0	40	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Jawaban responden Perencanaan Pengelolaan Dana Dana Desa Melibatkan Unsur Unsur Masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang (42,5%).
2. Jawaban responden Pemerintah Desa Dilarang Melakukan Pungutan Sebagai Penerimaan Desa Selain Yang Dietapkan Dalam Peraturan Desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 orang (45%).
3. Jawaban responden Dalam Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum, mayoritas menjawab setuju sebanyak 19 orang (47,5%)
4. Jawaban responden Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang (42,5%)

5. Jawaban responden Pengelolaan Dana Desa Dipertanggungjawabkan Kepada Otoritas Yang Tertinggi Dan Kepada Masyarakat Luas, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 orang (47,5%)

#### 4.1.3.2 Variabel Sistem Pengendalian Intern (Z)

Berdasarkan penyebaran angket kepada perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Tata Kelola sebagai berikut :

**Tabel 4.6.**

#### **Skor Angket Untuk Variabel Sistem Pengendalian Intern (Z)**

No	Sistem Pengendalian Intern (Z)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	35,0	19	47,5	7	17,5	0	0	0	0	40	100
2	18	45,0	15	37,5	7	17,5	0	0	0	0	40	100
3	15	37,5	16	40,0	9	22,5	0	0	0	0	40	100
4	17	42,5	13	32,5	10	25,0	0	0	0	0	40	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Sistem Pengendalian Intern adalah:

1. Jawaban responden Komunikasi Telah Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Efektif, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 orang (47,5%).
2. Jawaban responden Aparatur Desa Selalu Menerapkan Perilaku Dan Norma Yang Baik Dalam Setiap Kegiatan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (45%).
3. Jawaban responden . Setiap Transaksi Memiliki Bukti Pendukung Sebelum Dilakukannya Pencatatan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 16 orang (40%)

4. Jawaban responden Pemerintah Desa Selalu Melakukan Evaluasi Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Serta Membuat Rekomendasi Untuk Memperbaiki Pengendalian Intern, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang (42,5%).

#### 4.1.3.3 Variabel Tata Kelola (X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Tata Kelola sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Skor Angket Untuk Variabel Tata Kelola (X1)**

No	Tata Kelola (X1)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	35	17	42,5	9	22,5	0	0,0	0	0	40	100
2	11	27,5	22	55,0	7	17,5	0	0,0	0	0	40	100
3	14	35	22	55,0	4	10,0	0	0,0	0	0	40	100
4	18	45	16	40,0	6	15,0	0	0,0	0	0	40	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Tata Kelola adalah:

1. Jawaban responden Pemerintah Desa Menginformasikan Laporan Pelaksanaan ABDesa Kepada Masyarakat Dengan Media Informasi Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang (42,5%).
2. Jawaban responden Masyarakat Ikut Berperan Aktif Dalam Proses Penyusunan APBDesa Mulai Dari Pemberian Usulan, Pendapat, Kritik, Dan Saran, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 22 orang (55%)

3. Jawaban responden Pemerintah Desa Telah Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dalam Alokasi Dana Desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 22 orang (55%)
4. Jawaban responden Adanya Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Masyarakat Dalam Berkontribusi Memberikan Ide, Maupun Tenaga, Keahlian, Dalam Program Desa, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (45%).

#### 4.1.3.4 Variabel Budaya Organisasi (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada perangkat desa Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Budaya Organisasi sebagai berikut :

**Tabel 4.8.**

**Skor Angket Untuk Variabel Budaya Organisasi (X2)**

No	Budaya Organisasi (X2)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	32,5	21	52,5	6	15,0	0	0,0	0	0	40	100
2	13	32,5	18	45,0	9	22,5	0	0,0	0	0	40	100
3	11	27,5	21	52,5	8	20,0	0	0,0	0	0	40	100
4	16	40	19	47,5	5	12,5	0	0,0	0	0	40	100
5	13	32,5	18	45,0	8	20,0	0	0,0	0	0	40	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Budaya Organisasi adalah:

1. Jawaban responden Dalam Mengambil Suatu Keputusan, Anda Menanggung Semua Resiko Individu Yang Ada, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 21 orang (52,5%).

2. Jawaban responden Keberhasilan Tim Adalah Kontribusi Semua Perangkat desa Yang Bekerja Dalam Satu Unit, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 orang (45,0%).
3. Jawaban responden Hasil Kerja Yang Baik Merupakan Sebuah Kepuasan Bagi Saya, responden menjawab setuju sebanyak 21 orang (52,5%).
4. Jawaban responden Saya Memberikan Kontribusi Terhadap Organisasi Untuk Menjadi Lebih Baik, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 orang (47,5%).
5. Jawaban responden Mengutamakan Kemajuan Organisasi Dibandingkan Kepentingan Individu, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 orang (45%).

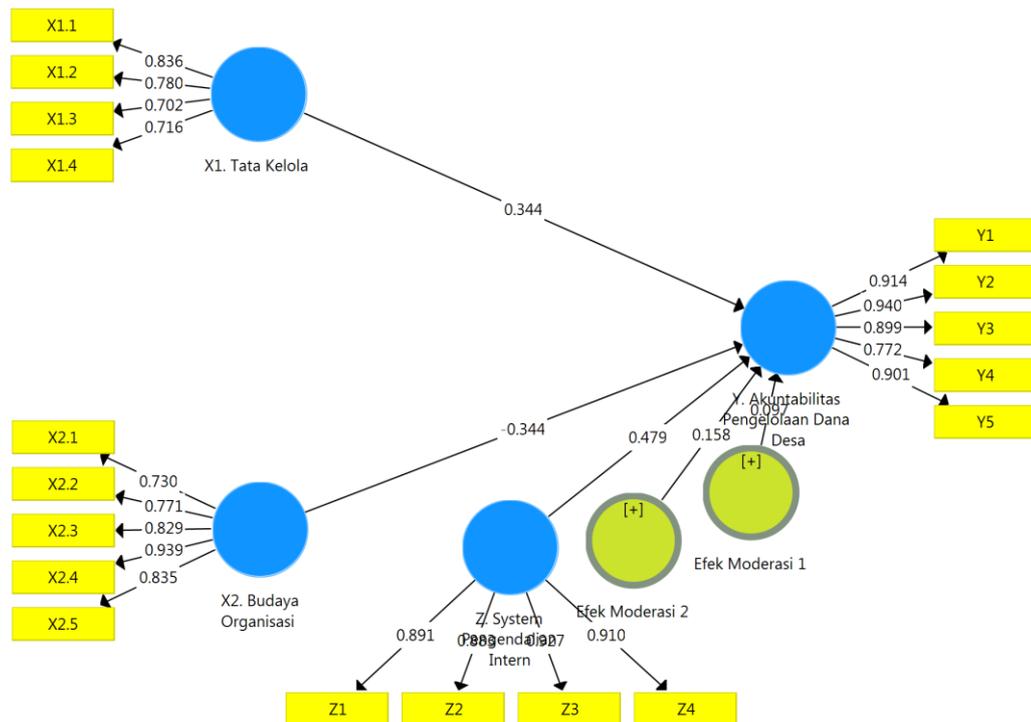
#### **4.2 Hasil Analisis Data**

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS).

Sebagai alternatif covariance based SEM, pendekatan variance based atau component based dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari menguji model kausalitas/teori ke component based predictive model (Ghozali & Latan, 2015). PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator

dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Berikut adalah hasil model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



**Gambar 4.1 PLS Algoritma**

#### 4.2.1. Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer Model)

Analisis model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

##### 4.2.1.1. Construct Reliability And Validity

Analisis konsistensi internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian

konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit  $> 0,600$  (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.9**  
**Validitas dan Realibilitas Konstruk**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	1,000	1,000	1,000	1,000
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	1,000	1,000	1,000	1,000
X1. Tata Kelola	0,773	0,874	0,845	0,578
X2. Budaya Organisasi	0,897	1,096	0,913	0,679
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,931	0,933	0,948	0,787
Z. System Pengendalian Intern	0,924	0,926	0,946	0,815

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel

1. Tata Kelola (X1) memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,845 > 0,600$  maka variabel Tata Kelola (X1) adalah reliabel
2. Budaya Organisasi (X2) memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,913 > 0,600$  maka variabel Budaya Organisasi (X2) adalah reliabel

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,948 > 0,600$  maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah reliabel
4. Sistem Pengendalian Intern (Z) memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,946 > 0,600$  maka variabel Sistem Pengendalian Intern (Z) adalah reliable.

#### 4.2.1.2. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*-nya. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,4) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.10 Validitas Konvergen**

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
X1.1			0,836			
X1.2			0,780			
X1.3			0,702			
X1.4			0,716			
X2.1				0,730		
X2.2				0,771		
X2.3				0,829		
X2.4				0,939		
X2.5				0,835		
Y1					0,914	
Y2					0,940	
Y3					0,899	
Y4					0,772	
Y5					0,901	
Z. System Pengendalian Intern * X1. Tata Kelola	1,138					

Z. System Pengendalian Intern * X2. Budaya Organisasi		1,074				
Z1						0,891
Z2						0,883
Z3						0,927
Z4						0,910

Lampiran 2 Validitas Konvergen

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

1. Nilai *outer loading* untuk variabel Tata Kelola (X1) lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Tata Kelola (X1) dinyatakan valid.
2. Nilai *outer loading* untuk variabel Budaya Organisasi (X2) lebih besar dari 0,4 maka semua indikator variabel Budaya Organisasi (X2) dinyatakan valid.
3. Nilai *outer loading* untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid.
4. Nilai *outer loading* untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (Z) lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Sistem Pengendalian Intern (Z) dinyatakan valid.

#### 4.2.1.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.11 Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)**

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating						
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	0,345					
X1. Tata Kelola	0,285	0,092				
X2. Budaya Organisasi	0,066	0,368	0,183			
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,176	0,173	0,655	0,249		
Z. System Pengendalian Intern	0,248	0,236	0,610	0,120	0,716	

Lampiran 3 Validitas *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)* maka

1. Variabel Tata Kelola (X1) dengan Budaya Organisasi (X2) sebesar  $0,183 < 0,900$ , korelasi variabel *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)* Tata Kelola (X1) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar  $0,655 < 0,900$  korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)* variabel Tata Kelola (X1) dengan Sistem Pengendalian Intern (Z) sebesar  $0,610 < 0,900$  , dengan demikian seluruh nilai korelasi Tata Kelola (X1) dinyatakan valid.

2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Budaya Organisasi (X2) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar  $0,249 < 0,900$ , nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Budaya Organisasi (X2) dengan Sistem Pengendalian Intern (Z) sebesar  $0,120 < 0,900$ , dengan demikian seluruh nilai korelasi Budaya Organisasi (X2) dinyatakan valid.
3. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) terhadap Sistem Pengendalian Intern (Z) adalah sebesar  $0,716 < 0,900$ , dengan demikian seluruh nilai korelasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid.

#### **4.2.2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)**

##### **4.2.2.1. Kolinearitas (*Colinierity /Variance Inflation Factor/VIF*)**

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar variabel laten/konstruktif apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung masalah jika dipandang dari sudut metodologis, karena memiliki dampak pada estimasi signifikansistatistiknya. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (*colinearity*). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* (Hair Jr et al., 2017).

Jika nilai VIF lebih besar dari 5,00 maka berarti terjadi masalah kolinearitas, dan sebaliknya tidak terjadi masalah kolinearitas jika nilai VIF  $< 5,00$  (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.12**  
**Kolinieritas**

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating					1,245	
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating					1,325	
X1. Tata Kelola					1,522	
X2. Budaya Organisasi					1,146	
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
Z. System Pengendalian Intern					1,541	

Lampiran 4 Tabel Kolinieritas

Dari data di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. VIF untuk Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating 1 adalah  $1,245 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinieritas)
2. VIF untuk Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating adalah  $1,325 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinieritas)
3. VIF untuk korelasi Tata Kelola (X1) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah  $1,522 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinieritas)
4. VIF untuk korelasi Budaya Organisasi (X2) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah  $1,146 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinieritas)

5. VIF untuk korelasi Sistem Pengendalian Intern (Z) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah  $1,541 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinearitas)

Dengan demikian, dari data-data di atas, model struktural dalam kasus ini tidak semua korelasi yang terbebas dari masalah kolinearitas.

#### 4.2.2.2. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair Jr et al., 2017)

1. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat
2. R Square sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.
3. Nilai R Square sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 4.13**

#### **Koefisien Determinasi**

	R Square	Adjusted R Square
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,638	0,584

Lampiran 5 Tabel Koefisien Determinasi

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh Tata Kelola (X1) dan Budaya Organisasi (X2) dengan Sistem Pengendalian Intern (Z) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah sebesar 0,638 artinya mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X1, X2 dan Z sebesar 63,8%

atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan 26,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### **4.2.2.2. Pengujian Hipotesis**

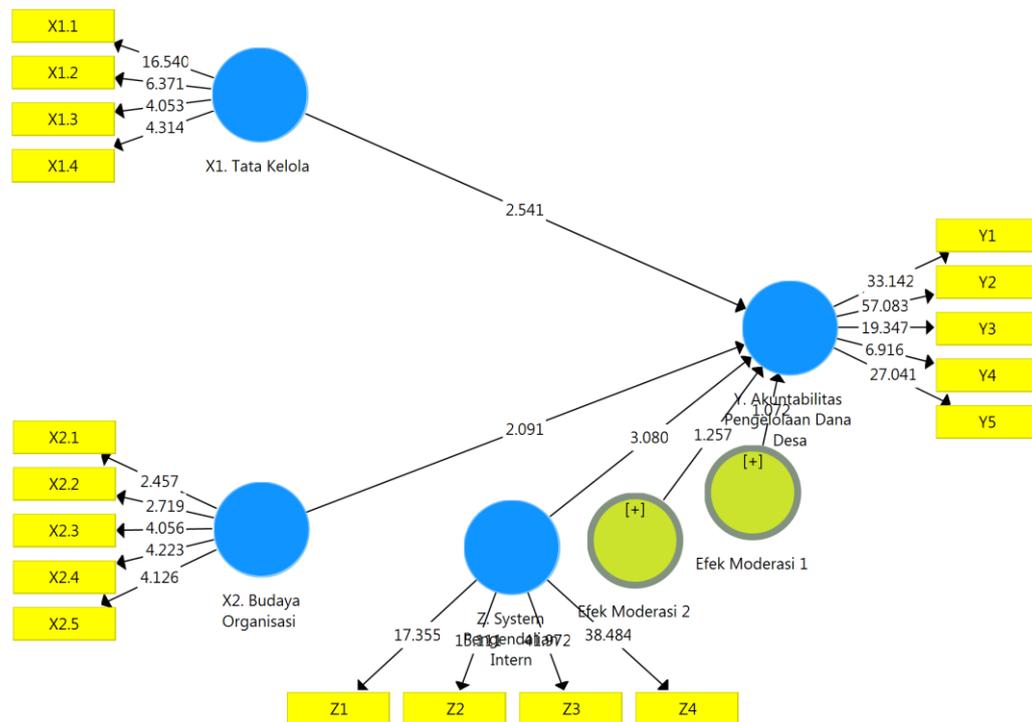
Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value)  $<$  Alpha (0,05) maka  $H_0$  ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value)  $>$  Alpha (0,05) maka  $H_0$  diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)



Gambar 4.2

## Pengujian Hipotesis

Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	0,097	0,082	0,090	1,072	0,284
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel	0,158	0,124	0,126	1,257	0,209

Moderating					
X1. Tata Kelola -> Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,344	0,390	0,135	2,541	0,011
X2. Budaya Organisasi -> Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-0,344	-0,313	0,164	2,091	0,037

Lampiran 6 Tabel Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh variabel Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,344 (positif), maka peningkatan nilai variabel Tata Kelola (X1) akan diikuti peningkatan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pengaruh variabel Tata Kelola (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,011 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Tata Kelola (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah berpengaruh signifikan.
2. Pengaruh variabel X2 Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai koefisien jalur sebesar -0,344 (negatif), maka penurunan nilai variabel Budaya Organisasi (X2) akan diikuti penurunan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pengaruh variabel Budaya Organisasi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,037 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Budaya Organisasi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah berpengaruh signifikan.

3. Pengaruh variabel Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yang diModerating dengan Sistem Pengendalian Intern (Z) mempunyai koefisien jalur sebesar 0.097 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,0284 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Dengan demikian, variabel Sistem Pengendalian Intern tidak memoderating pengaruh Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).
4. Pengaruh variabel Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yang diModerating dengan Sistem Pengendalian Intern (Z) mempunyai koefisien jalur sebesar 0.158 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,209 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Y). Dengan demikian, variabel Sistem Pengendalian Intern tidak memoderating pengaruh Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Hasil penelitian ini bahwa Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai koefisien jalur sebesar 0.344 (positif), dan nilai *P-Values* sebesar  $0,011 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan

bahwa antara Tata Kelola (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah berpengaruh signifikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif (Lubis et al., 2020). Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Nurdin & Wijaya, 2019)

Pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa perlu diwujudkan untuk pemerintah yang bersih, bermartabat bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola yang baik. Jika tata kelola baik atau tinggi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini disebabkan tata kelola pemerintahan desa baik, terkonsep, teratur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undang maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Astuty, 2016).

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dilakukan oleh (Ubaidillah & Arumsari,

2019) menunjukkan bahwa Tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **4.3.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai koefisien jalur sebesar sebesar -0.334 (negatif), dan nilai *P-Values* sebesar  $0,037 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Budaya Organisasi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah berpengaruh signifikan

Dalam organisasi, budaya organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi tersebut, karena budaya organisasi dapat merubah sikap seseorang dalam organisasi hanya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Perubahan perilaku tersebut dapat mempengaruhi sistem yang berada dalam organisasi tersebut. Sehingga budaya organisasi menjadi sangat penting dalam penerapan sistem pengendalian intern, karena untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang sistematis (Hawa, , et al., 2021).

Menurut (Maryati, 2018) budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, sikap dan tradisi bersama dimana hal tersebut mengikat anggota organisasi sebagai acuan untuk bekerja dan berinteraksi sesama anggota. Budaya organisasi merupakan system nilai organisasi yang akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku (Asriandi et al., 2018)

Terdapat tujuh karakteristik primer yang digunakan secara bersama dalam memahami hakikat dari budaya organisasi (Robbins & Judge, 2021) yaitu inovasi

dan mengambil resiko, perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, agrefitas dan kemandapan. Dari budaya organisasi tersebut pengelolaan dana desa akan lebih akurat dan cepat dihasilkan. Jadi pengelolaan dana desa akan lebih berkualitas jika budaya organisasi memadai.

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dilakukan oleh (Syahrir et al., 2019) menunjukkan bahwa Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### **4.3.3 Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa koefisien jalur sebesar 0,097 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,284 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern tidak memoderating pengaruh Tata Kelola (X1) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah melalui *good governance* (Usman et al., 2015). Menurut Tunggal (2011) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah (Natalia & Sujana, 2022)

Tata kelola (governance) yang baik tidak terlepas dari akuntabilitas. Untuk itu, perlu adanya pengawasan untuk terhindar dari kesalahan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat berperan dalam memaksimalkan tata kelola (governance) (Hawa et al., 2021). Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya (Alpi, 2019b).

Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas hasil pemeriksaan yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil (Alpi, 2019)

Hasil penelitian (Ramon, 2014) dan (Alpi & Ramadhan, 2018) memberikan argument bahwa Sistem Pengendalian Intern dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah didorong oleh adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang sangat baik

#### **4.3.4 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa koefisien jalur 0.158 (positif) dan memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,209 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern tidak memoderating pengaruh Budaya Organisasi (X2) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Budaya organisasi sebuah asumsi atau sistem keyakinan, nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah dalam perubahan eksternal maupun internal. Budaya organisasi juga digunakan untuk mengarahkan para anggota organisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja serta memberikan motivasi suatu organisasi (Natalia & Sujana, 2022)

Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Sehingga budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lain. Dalam organisasi, budaya organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi tersebut, karena budaya organisasi dapat merubah sikap seseorang dalam organisasi hanya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Perubahan perilaku tersebut dapat mempengaruhi system yang berada dalam organisasi tersebut. Sehingga budaya organisasi menjadi sangat penting dalam penerapan system pengendalian intern, karena untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik diperlukan system akuntansi keuangan daerah yang sistematis (Hawa et al., 2021)

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya budaya organisasi yang diterapkan pada instansi pemerintah desa belum tentu dapat mengurangi kecurangan, karena kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan oleh aparatur desa yang awalnya memiliki norma dan etika yang baik. Budaya organisasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh karena masih kurangnya kesempatan dalam memberikan pendapat yang

diberikan oleh pimpinan kepada staff/aparatur desa yang lain, kurangnya pelatihan/diklat akan pentingnya etika dalam budaya organisasi yang menjelaskan terkait praktik yang tidak diperbolehkan dan menangani dilema etika yang mungkin muncul (Natalia & Sujana, 2022)

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Y) Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar .
2. Budaya Organisasi (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar .
3. Sistem Pengendalian Intern (Z) tidak memoderating pengaruh Tata Kelola (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Y) Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar .
4. Sistem Pengendalian Intern (Z) tidak memoderating pengaruh antara Budaya Organisasi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Y) Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar .

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar agar lebih memperhatikan Tata Kelola keuangan yang ada di Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar .
2. Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar agar lebih memperhatikan Budaya Organisasi sehingga perangkatdesa terbiasa bekerja dengan budaya yang lebih baik.

3. Pada Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar agar terus meningkatkan Pengendalian internal sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2019a). Faktor-Faktor Kualitas Pemeriksaan Pada Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 129–138.
- Alpi, M. F. (2019b). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103–114.
- Asriandi, A., Gani, M. U., & Hasbi, A. M. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 1(2), 1–13.
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal dan Pengendalian Intern dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1), 1–36.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159.
- Butler, D. C., Glen Jr, W. B., Schandl, C., & Phillips, A. (2020). Glycogen Storage Disease Type IV Diagnosed At Fetal Autopsy. *Pediatric and Developmental Pathology*, 23(4), 301–305.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2021). *Jasa Audit dan Assurance*. Salemba Empat.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(2), 1–23.
- Haryanto, H., Salmuddin, S., & Arifuddin, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Hawa, F. D., Agus Sudrajat, M., & Ubaidillah, M. (2021). *Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Di Kabupaten Magetan)*.
- Hawa, F. D., Sudrajat, M. A., & Ubaidillah, M. (2021). Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Di Kabupaten Magetan). *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3.
- Hermawan, R. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Duta Media Publishing.
- Jones, J., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Intern Pada Pt. Sarana Sulut Ventura. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 456. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30177.2020>
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Lubis, A., Sari, E. N., & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Maryati, T. (2018). Analisis Budaya Organisasi, Motivasi Dan Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 9(1), 75–95. <https://doi.org/10.18196/mb.9155>
- Maulana, M. (2020). Budaya Organisasi Habudin. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(1), 23–32.
- Mulyadi. (2019). *Akuntansi Biaya (Edisi Lima)*. UPP STIM YKPN.
- Nainggolan, A. (2018). Kajian Konseptual tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 144–152.
- Napitupulu, T. A., & Medina, D. A. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keberhasilan Pengembangan E-Government. *Binus Business Review*, 3(1), 382. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1326>
- Natalia, S. A. P. D., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan

Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3552–3566.

- Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1), 85–95.
- Nurviasari, R. (2016). Pengaruh Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), 1–16.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(2), 271–290. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Ramon, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 1–11.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Perilaku Organisasi* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Rokhlinsari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Saragih, F., & Parlina, A. S. (2021). *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Sari, A. P., Syarwani, A., & Harris, H. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 3(1), 97–113. <https://doi.org/10.37411/jjem.v2i2.642>

- Sari, E. N. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara*.
- Septiani, E., Holiawati, & Ruhayat, E. (2019). Environmental Performance , Intellectual Capital , Praktik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 61–70.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya: Teori dan Penerapannya Seluk Beluk Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Syahrir, M., Hasbuddin, H., & Hadisantoso, E. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Keuangan Daerah Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bombana. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 20–37.
- Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 1–11.
- Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671–680. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>
- Tangkeallo, D. I., & Kannapadang, D. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Cu Sauan Sibarrung Tp Makale. *Economix*, 8, 127–138.
- Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019). Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*, 271–277.
- Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *Jurnal FEB UNMUL Kinerja*, 16(1), 10–21.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.

Wiratna, S. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.

Wirawan, W. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pertama)*. PT Raja Grafindo Persada.

**PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA  
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR**

---

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Responden  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak) jurusan akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Medan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tanggapan terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai topik “Pengaruh Tata Kelola Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan System Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada Kecamatan Tebing Syahbandar”, Adapun pengumpulan data ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan akademis dan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. data dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan peneliti ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis.

Terkhususnya untuk kepala desa dan perangkat desa kecamatan tebing syahbandar kabupaten serdang bedagai akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu/saudara/i yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Medan,

Tri Andini Br Sinaga

## KUESIONER PENELITIAN

### DATA IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Alamat desa :  
Jenis kelamin :  
Pendidikan terakhir :  
Jabatan :  
Lama bekerja :

### PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

Kepada bapak/ibu/saudara/i diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya pada kenyataan.

Barilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Semakin tinggi tingkat persetujuan bapak/ibu/saudara/i pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.

Terdapat 5 alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori	Bobot /Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

**TATA KELOLA (X1)**

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah Desa Menginformasikan Laporan Pelaksanaan ABDesa Kepada Masyarakat Dengan Media Informasi Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat					
2	Masyarakat Ikut Berperan Aktif Dalam Proses Penyusunan APBDesa Mulai Dari Pemberian Usulan, Pendapat, Kritik, Dan Saran					
3	Pemerintah Desa Telah Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dalam Alokasi Dana Desa					
4	Adanya Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Masyarakat Dalam Berkontribusi Memberikan Ide, Maupun Tenaga, Keahlian, Dalam Program Desa					

**BUDAYA ORGANISASI (X2)**

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Dalam Mengambil Suatu Keputusan, Anda Menanggung Semua Resiko Individu Yang Ada					
2	Keberhasilan Tim Adalah Kontribusi Semua Pegawai Yang Bekerja Dalam Satu Unit					
3	Hasil Kerja Yang Baik Merupakan Sebuah Kepuasan Bagi Saya					
4	Saya Memberikan Kontribusi Terhadap Organisasi Untuk Menjadi Lebih Baik					
5	Mengutamakan Kemajuan Organisasi Dibandingkan Kepentingan Individu					

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN (Z)**

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Komunikasi Telah Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Efektif					
2	Aparatur Desa Selalu Menerapkan Perilaku Dan Norma Yang Baik Dalam Setiap Kegiatan					
3	Setiap Transaksi Memiliki Bukti Pendukung Sebelum Dilakukannya Pencatatan					
4	Pemerintah Desa Selalu Melakukan Evaluasi Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Serta Membuat Rekomendasi Untuk Memperbaiki Pengendalian Intern					

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)**

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Perencanaan Pengelolaan Dana Dana Desa Melibatkan Unsur Unsur Masyarakat					
2	Pemerintah Desa Dilarang Melakukan Pungutan Sebagai Penerimaan Desa Selain Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Desa					
3	Dalam Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum					
4	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota					
5	Pengelolaan Dana Desa Dipertanggungjawabkan Kepada Otoritas Yang Tertinggi Dan Kepada Masyarakat Luas					

## TABULASI KUISIONER

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL
A01	4	5	5	5	5	24
A02	5	5	5	4	5	24
A03	3	4	5	3	4	19
A04	3	3	4	3	3	16
A05	5	4	5	5	4	23
A06	4	4	3	4	4	19
A07	4	4	4	5	4	21
A08	4	3	4	5	3	19
A09	5	5	5	3	5	23
A10	4	4	4	4	4	20
A11	3	3	4	4	4	18
A12	4	3	4	4	3	18
A13	4	4	4	4	4	20
A14	3	3	3	3	3	15
A15	5	4	5	4	4	22
A16	3	4	4	5	3	19
A17	4	4	4	5	4	21
A18	5	5	5	5	5	25
A19	3	3	3	3	3	15
A20	5	5	5	5	5	25
A21	3	3	3	3	3	15
A22	4	4	4	4	5	21
A23	4	4	4	4	4	20
A24	5	5	4	4	4	22
A25	4	4	4	4	4	20
A26	4	4	4	4	4	20
A27	4	4	4	4	4	20
A28	4	4	4	4	4	20
A29	3	3	3	3	3	15
A30	3	3	3	3	3	15
A31	4	4	4	4	4	20
A32	5	5	5	5	5	25
A33	5	5	5	5	5	25
A34	5	5	5	5	4	24
A35	5	5	5	5	5	25
A36	5	5	5	5	5	25
A37	4	4	4	4	4	20
A38	3	3	3	3	3	15

A39	4	4	4	4	4	20
A40	5	5	5	5	5	25

	Z1	Z2	Z3	Z4	TOTAL
A01	4	3	4	3	14
A02	3	5	4	5	17
A03	5	5	5	5	20
A04	4	4	3	3	14
A05	4	4	3	4	15
A06	4	4	4	3	15
A07	5	5	5	4	19
A08	3	5	4	3	15
A09	4	3	4	4	15
A10	4	4	3	4	15
A11	4	5	5	5	19
A12	5	4	4	5	18
A13	4	4	4	3	15
A14	4	4	4	4	16
A15	4	4	4	4	16
A16	5	5	5	5	20
A17	4	5	4	5	18
A18	5	5	5	5	20
A19	3	3	3	3	12
A20	5	5	5	5	20
A21	3	3	3	3	12
A22	4	5	4	4	17
A23	4	4	4	4	16
A24	4	4	5	5	18
A25	4	4	4	4	16
A26	4	4	4	4	16
A27	4	4	4	4	16
A28	4	4	3	4	15
A29	3	3	3	3	12
A30	3	3	3	3	12
A31	4	4	4	4	16
A32	5	5	5	5	20
A33	5	5	5	5	20
A34	5	5	5	5	20
A35	5	5	5	5	20
A36	5	5	5	5	20

A37	5	5	5	5	20
A38	3	3	3	3	12
A39	5	5	5	5	20
A40	5	5	5	5	20

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
A01	4	4	4	4	16
A02	5	4	5	5	19
A03	4	3	5	3	15
A04	3	3	4	4	14
A05	4	4	4	5	17
A06	3	4	4	4	15
A07	5	4	4	5	18
A08	3	3	5	5	16
A09	4	5	5	3	17
A10	4	3	3	5	15
A11	4	4	4	4	16
A12	4	5	5	5	19
A13	5	4	4	4	17
A14	3	4	4	4	15
A15	4	3	3	4	14
A16	3	5	5	5	18
A17	4	4	4	4	16
A18	4	4	4	3	15
A19	3	4	4	4	15
A20	4	4	4	4	16
A21	4	5	5	5	19
A22	5	4	4	5	18
A23	4	4	4	5	17
A24	5	4	4	4	17
A25	5	5	5	5	20
A26	5	4	4	5	18
A27	4	4	4	4	16
A28	4	5	5	4	18
A29	3	3	3	3	12
A30	3	3	3	3	12
A31	4	4	4	4	16
A32	5	5	5	5	20
A33	5	5	5	5	20
A34	5	4	4	5	18

A35	5	5	5	5	20
A36	5	5	5	5	20
A37	5	4	4	4	17
A38	3	4	4	3	14
A39	4	4	4	4	16
A40	5	5	5	5	20

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
A01	4	3	3	3	3	16
A02	4	3	3	4	4	18
A03	5	5	5	5	5	25
A04	5	5	4	4	3	21
A05	4	4	4	4	3	19
A06	4	3	4	4	4	19
A07	5	5	5	5	5	25
A08	4	4	3	5	4	20
A09	4	4	4	3	4	19
A10	3	3	4	4	3	17
A11	4	4	4	5	5	22
A12	3	3	4	4	4	18
A13	4	4	4	4	4	20
A14	4	4	4	4	4	20
A15	5	5	4	4	4	22
A16	5	5	5	5	5	25
A17	5	5	4	5	4	23
A18	5	5	5	5	5	25
A19	4	4	4	4	3	19
A20	3	3	3	3	3	15
A21	3	3	4	5	5	20
A22	4	4	4	4	4	20
A23	4	4	4	4	4	20
A24	3	3	3	3	3	15
A25	5	5	5	5	5	25
A26	5	5	5	5	4	24
A27	4	4	4	4	4	20
A28	5	5	3	4	6	23
A29	4	4	5	5	5	23
A30	4	4	4	5	5	22
A31	4	4	4	4	4	20
A32	4	4	4	4	4	20

A33	4	4	4	4	4	20
A34	4	4	4	4	4	20
A35	3	3	3	3	3	15
A36	5	5	5	5	5	25
A37	4	4	3	4	4	19
A38	5	5	5	5	5	25
A39	5	5	5	5	5	25
A40	4	4	5	5	5	23

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Validitas dan Realibilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
<b>Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>X1. Tata Kelola</b>	<b>0,773</b>	<b>0,874</b>	<b>0,845</b>	<b>0,578</b>
<b>X2. Budaya Organisasi</b>	<b>0,897</b>	<b>1,096</b>	<b>0,913</b>	<b>0,679</b>
<b>Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	<b>0,931</b>	<b>0,933</b>	<b>0,948</b>	<b>0,787</b>
<b>Z. System Pengendalian Intern</b>	<b>0,924</b>	<b>0,926</b>	<b>0,946</b>	<b>0,815</b>

### Lampiran 2 Validitas Konvergen

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
<b>X1.1</b>			<b>0,836</b>			
<b>X1.2</b>			<b>0,780</b>			
<b>X1.3</b>			<b>0,702</b>			
<b>X1.4</b>			<b>0,716</b>			
<b>X2.1</b>				<b>0,730</b>		
<b>X2.2</b>				<b>0,771</b>		
<b>X2.3</b>				<b>0,829</b>		
<b>X2.4</b>				<b>0,939</b>		
<b>X2.5</b>				<b>0,835</b>		
<b>Y1</b>					<b>0,914</b>	
<b>Y2</b>					<b>0,940</b>	
<b>Y3</b>					<b>0,899</b>	
<b>Y4</b>					<b>0,772</b>	

Y5					0,901	
Z. System Pengendalian Intern * X1. Tata Kelola	1,138					
Z. System Pengendalian Intern * X2. Budaya Organisasi		1,074				
Z1						0,891
Z2						0,883
Z3						0,927
Z4						0,910

Lampiran 3 Validitas *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT)*

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating						
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	0,345					
X1. Tata Kelola	0,285	0,092				
X2. Budaya Organisasi	0,066	0,368	0,183			
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,176	0,173	0,655	0,249		
Z. System Pengendalian Intern	0,248	0,236	0,610	0,120	0,716	

Lampiran 4 Tabel Kolinieritas

	Efek Moderating 1	Efek Moderating 2	X1. Tata Kelola	X2. Budaya Organisasi	Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z. System Pengendalian Intern
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating					1,245	
Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating					1,325	
X1. Tata Kelola					1,522	
X2. Budaya Organisasi					1,146	
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
Z. System Pengendalian Intern					1,541	

Lampiran 5 Tabel Koefisien Determinasi

	R Square	Adjusted R Square
Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,638	0,584

Lampiran 6 Tabel Pengujian Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating	0,097	0,082	0,090	1,072	0,284

<b>Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan System Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating</b>	0,158	0,124	0,126	1,257	<b>0,209</b>
<b>X1. Tata Kelola -&gt; Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	0,344	0,390	0,135	2,541	<b>0,011</b>
<b>X2. Budaya Organisasi -&gt; Y. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	-0,344	-0,313	0,164	2,091	<b>0,037</b>

## DATA MENTAH

Statistics					
		Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan	Lama Bekerja
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		1,3000	2,8500	1,9500	2,1500
Std. Deviation		,46410	,92126	,93233	,83359
Minimum		1,00	1,00	1,00	1,00
Maximum		2,00	4,00	3,00	3,00

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	28	70,0	70,0	70,0
	Perempuan	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21 – 30 Tahun	4	10,0	10,0	10,0
	31 – 40 Tahun	8	20,0	20,0	30,0
	41 - 50 Tahun	18	45,0	45,0	75,0
	51 - 60 Tahun	10	25,0	25,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	18	45,0	45,0	45,0
	D3	6	15,0	15,0	60,0
	S1	16	40,0	40,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Lama Bekerja</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 Tahun	11	27,5	27,5	27,5
	5 - 10 Tahun	12	30,0	30,0	57,5
	> 10 Tahun	17	42,5	42,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Statistics</b>						
		Perencanaan Pengelolaan Dana Dana Desa Melibatkan Unsur Unsur Masyarakat	Pemerintah Desa Dilarang Melakukan Pungutan Sebagai Penerimaan Desa Selain Yang Dietapkan Dalam Peraturan Desa	Dalam Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota	Pengelolaan Dana Desa Dipertanggungjawabkan Kepada Otoritas Yang Tertinggi Dan Kepada Masyarakat Luas
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,08	4,05	4,18	4,13	4,03
Std. Deviation		,764	,749	,712	,757	,733
Minimum		3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5

<b>Perencanaan Pengelolaan Dana Dana Desa Melibatkan Unsur Unsur Masyarakat</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	25,0	25,0	25,0
	Setuju	17	42,5	42,5	67,5
	Sangat Setuju	13	32,5	32,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Pemerintah Desa Dilarang Melakukan Pungutan Sebagai Penerimaan Desa Selain Yang Dietapkan Dalam Peraturan Desa</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	25,0	25,0	25,0
	Setuju	18	45,0	45,0	70,0
	Sangat Setuju	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Dalam Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	17,5	17,5	17,5
	Setuju	19	47,5	47,5	65,0
	Sangat Setuju	14	35,0	35,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	22,5	22,5	22,5
	Setuju	17	42,5	42,5	65,0
	Sangat Setuju	14	35,0	35,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Pengelolaan Dana Desa Dipertanggungjawabkan Kepada Otoritas Yang Tertinggi Dan Kepada Masyarakat Luas</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	25,0	25,0	25,0
	Setuju	19	47,5	47,5	72,5
	Sangat Setuju	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Statistics</b>					
		Komunikasi Telah Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Efektif	Aparatur Desa Selalu Menerapkan Perilaku Dan Norma Yang Baik Dalam Setiap Kegiatan	Setiap Transaksi Memiliki Bukti Pendukung Sebelum Dilakukannya Pencatatan	Pemerintah Desa Selalu Melakukan Evaluasi Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Serta Membuat Rekomendasi Untuk Memperbaiki Pengendalian Intern
N	Valid	40	40	40	40

	Missing	0	0	0	0
Mean		4,18	4,28	4,15	4,18
Std. Deviation		,712	,751	,770	,813
Minimum		3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5

<b>Komunikasi Telah Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Efektif</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	17,5	17,5	17,5
	Setuju	19	47,5	47,5	65,0
	Sangat Setuju	14	35,0	35,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Aparatur Desa Selalu Menerapkan Perilaku Dan Norma Yang Baik Dalam Setiap Kegiatan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	17,5	17,5	17,5
	Setuju	15	37,5	37,5	55,0
	Sangat Setuju	18	45,0	45,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Setiap Transaksi Memiliki Bukti Pendukung Sebelum Dilakukannya Pencatatan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	22,5	22,5	22,5
	Setuju	16	40,0	40,0	62,5
	Sangat Setuju	15	37,5	37,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Pemerintah Desa Selalu Melakukan Evaluasi Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Serta Membuat Rekomendasi Untuk Memperbaiki Pengendalian Intern</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	25,0	25,0	25,0
	Setuju	13	32,5	32,5	57,5
	Sangat Setuju	17	42,5	42,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Statistics</b>					
		Pemerintah Desa Menginformasikan Laporan Pelaksanaan ABDesa Kepada Masyarakat Dengan Media Informasi Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat	Masyarakat Ikut Berperan Aktif Dalam Proses Penyusunan APBDesa Mulai Dari Pemberian Usulan, Pendapat, Kritik, Dan Saran	Pemerintah Desa Telah Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dalam Alokasi Dana Desa	Adanya Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Masyarakat Dalam Berkontribusi Memberikan Ide, Maupun Tenaga, Keahlian, Dalam Program Desa
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,13	4,10	4,25	4,30
Std. Deviation		,757	,672	,630	,723
Minimum		3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5

<b>Pemerintah Desa Menginformasikan Laporan Pelaksanaan ABDesa Kepada Masyarakat Dengan Media Informasi Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	22,5	22,5	22,5
	Setuju	17	42,5	42,5	65,0
	Sangat Setuju	14	35,0	35,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Masyarakat Ikut Berperan Aktif Dalam Proses Penyusunan APBDesa Mulai Dari Pemberian Usulan, Pendapat, Kritik, Dan Saran</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	17,5	17,5	17,5
	Setuju	22	55,0	55,0	72,5
	Sangat Setuju	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Pemerintah Desa Telah Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dalam Alokasi Dana Desa</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	10,0	10,0	10,0
	Setuju	22	55,0	55,0	65,0
	Sangat Setuju	14	35,0	35,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Adanya Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Masyarakat Dalam Berkontribusi Memberikan Ide, Maupun Tenaga, Keahlian, Dalam Program Desa</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	6	15,0	15,0	15,0
	Setuju	16	40,0	40,0	55,0
	Sangat Setuju	18	45,0	45,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Statistics</b>						
		Dalam Mengambil Suatu Keputusan, Anda Menanggung Semua Resiko Individu Yang Ada	Keberhasilan Tim Adalah Kontribusi Semua Pegawai Yang Bekerja Dalam Satu Unit	Hasil Kerja Yang Baik Merupakan Sebuah Kepuasan Bagi Saya	Saya Memberikan Kontribusi Terhadap Organisasi Untuk Menjadi Lebih Baik	Mengutamakan Kemajuan Organisasi Dibandingkan Kepentingan Individu
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,18	4,10	4,08	4,28	4,18
Std. Deviation		,675	,744	,694	,679	,781
Minimum		3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	6

<b>Dalam Mengambil Suatu Keputusan, Anda Menanggung Semua Resiko Individu Yang Ada</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	6	15,0	15,0	15,0
	Setuju	21	52,5	52,5	67,5
	Sangat Setuju	13	32,5	32,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Keberhasilan Tim Adalah Kontribusi Semua Pegawai Yang Bekerja Dalam Satu Unit</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	22,5	22,5	22,5
	Setuju	18	45,0	45,0	67,5
	Sangat Setuju	13	32,5	32,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Hasil Kerja Yang Baik Merupakan Sebuah Kepuasan Bagi Saya</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	8	20,0	20,0	20,0
	Setuju	21	52,5	52,5	72,5
	Sangat Setuju	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Saya Memberikan Kontribusi Terhadap Organisasi Untuk Menjadi Lebih Baik</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	5	12,5	12,5	12,5
	Setuju	19	47,5	47,5	60,0
	Sangat Setuju	16	40,0	40,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

<b>Mengutamakan Kemajuan Organisasi Dibandingkan Kepentingan Individu</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	20,0	20,0	20,0
	4	18	45,0	45,0	65,0
	5	13	32,5	32,5	97,5
	6	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/09/01/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 09/01/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TRI ANDINI BR SINAGA  
NPM : 1905170105  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Rendahnya kemampuan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kurang efektifnya pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Judul : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Judul : 1. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
2. ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Objek/Lokasi Penelitian : DESA PAYA PASIR KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(TRI ANDINI BR SINAGA)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

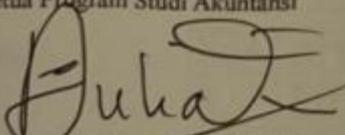
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/09/01/2023

Nama Mahasiswa : TRI ANDINI BR SINAGA  
NPM : 1905170105  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 09/01/2023  
Nama Dosen pembimbing\*) : M. Firza Alpi, SE., M.Si (13 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*)

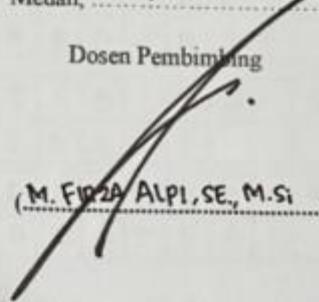
PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELDAAAN DANA DESA DENGAN  
SISTEM PENGENDALUAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. )

Medan, 21 FEBRUARI 2023

Dosen Pembimbing

  
( M. FIRZA ALPI, SE., M.Si )

Keterangan:

\*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditai oleh Dosen Pembimbing

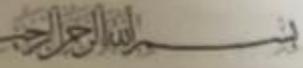
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lomboran ke-2 ini pada form online "Upload pengajuan Judul Skripsi"



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 Februari 2023

Yth.  
Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : TRI ANDINI BR SINAGA

Nomor KTP : 1905170105

Alamat/Tgl Lahir : PAYA PASIR / 13 MEI 2001

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : DESA PAYA PASIR KECAMATAN ANTEBING SYAHBANDAR

Alamat Penelitian: KANTOR CAMAT TEBING SYAHBANDAR KAB. SERGAI

Alamat Penelitian : DESA PAYA PASIR KECAMATAN ANTEBING SYAHBANDAR

Mohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.  
Sebelumnya saya lampirkan syarat-syarat lain :  
1. Salinan SPP tahap berjalan  
2. Bukti pemohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

( ASOS. PROF. DR. ZULIA HANUM, SE, M. SI )

( TRI ANDINI BR SINAGA )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 492/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 02 Sya'ban 1444 H  
22 Februari 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Camat Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai**  
Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
Npm : 1905170105  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Tebing Syahbandar

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 494/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
 N P M : 1905170105  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Tebing Syahbandar

Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **22 Februari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 02 Sya'ban 1444 H  
 22 Februari 2023 M



**Drs. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

1. Peringgal





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR

JL. NEGARA TEBING TINGGI – BATU BARA, DESA PAYA PASIR  
KODE POS 20652

Nomor : 18.53/070 / GA /2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian,-

Tebing Syahbandar, Maret 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Tempat.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 492/II.2-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Izin Riset Pendahuluan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa :

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
NPM : 195170105  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Tebing Syahbandar.

Dalam rangka Penelitian dan Pengumpulan Data di Kecamatan Tebing Syahbandar untuk hal ini kami *tidak keberatan* dan saat penelitian tetap mengedepankan hal-hal yang membangun untuk kemajuan Kecamatan Tebing Syahbandar serta mentaati ketentuan / peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dan diucapkan terima kasih.

CAMAT TEBING SYAHBANDAR



SAMINO, S.Pd  
PENATA Tk I

NIP. 19671028 198712 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TRI ANDINI BR SINAGA  
N P M : 1905170105  
Dosen Pembimbing : M. FIRZA ALPI, SE., M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : PENGARUH TATA KELOLA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- fenomena / Bukti - penulisan		
Bab 2	- kerangka literatur - penulisan		
Bab 3	- Metodology - penulisan		
Daftar Pustaka	Mendelus		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Kuesioner		
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar		

Medan, 26 Oktober 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, SE., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum SE, M.Si)



### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 17 Oktober 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi merangkan bahwa :

Nama : *Tri Andini Br Sinaga*  
PM. : *1905170105*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Paya Pasir, 13 Mei 2001*  
Alamat Rumah : *Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai*  
Judul Proposal : *Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Kecamatan Tebing Syahbandar*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Revisi kata belah</i>
Bab II	<i>Revisi kenger konsep.</i>
Bab III	<i>Revisi definiti operasional, waktu publikasi.</i>
Lainnya	<i>Tambahkan syarat publikasi.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *17 Oktober 2023*

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Fizza Alpi, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj Syafrida Hani, SE., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 17 Oktober 2023* menerangkan bahwa:

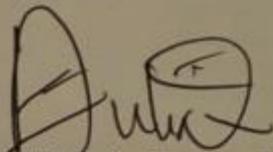
Nama : Tri Andini Br Sinaga  
NPM : 1905170105  
Tempat / Tgl.Lahir : Paya Pasir, 13 Mei 2001  
Alamat Rumah : Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai  
Judul Proposal : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Kecamatan Tebing Syahbandar

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *M. Firza Alpi, SE.,M.Si*

Medan, 17 Oktober 2023

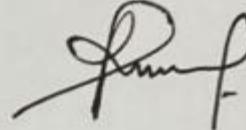
TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

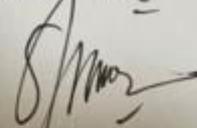


Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Firza Alpi, SE.,M.Si

Pembanding



Dr. Hj Syafriada Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

30/10/2023



Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PT SATU MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK.BAN-PT/14/2017/20202  
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 822490 - 8224967 Fax: (061) 8215474 - 8217981  
@umsuumsu @umsuumsu @umsuumsu @umsuumsu @umsuumsu

No. Surat : 1139/II.3-AU/UMSU-051/2023  
Temp. (t.a.) : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 22 Rabul Akhir 1445 H  
06 November 2023 M

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Kantor Camat Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai  
Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai  
Di  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/wisata yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

- Nama : Tri Andini Br. Sinaga
- N P M : 1905170105
- Semester : IX (Sembilan)
- Program Studi : Akuntansi
- Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Kecamatan Tebing Syahbandar

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :  
1. Pertinggal

Dekan  
  
H. Sinaga, SE., MM., M.Si., CMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
N : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR**

**JALAN LINTAS TEBING TINGGI – BATU BARA, DUSUN I DESA PAYA PASIR**

**SUMATERA UTARA, KODEPOS 20652**

Tebing Syahbandar, 01 Desember 2023

Nomor : 18.53/144/92/2023  
Tempat : -  
Perihal : Telah Menyelesaikan Riset di  
Kec. Tebing Syahbandar

kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 492/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Izin Riset dan Izin Penelitian, dengan ini memberitahukan dan menginformasikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Menerangkan bahwasanya :

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
Npm : 1905170105  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Tebing Syahbandar.

Telah selesai melaksanakan riset di Kecamatan Tebing Syahbandar.  
Demikian Surat ini di Perbuat untuk di pergunakan Seperlunya.

Tebing Syahbandar, 01 Desember 2023

Camat/Tebing Syahbandar



**ALFIAN PURBA, SE.MM**  
**PEMBINA**  
**NIP.197803182011011006**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Tri Andini Br Sinaga  
NPM : 1905170105  
Tempat dan tanggal lahir : Paya Pasir, 13 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab.  
Serdang Bedagai  
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara  
Email : andinidyn133@gmail.com

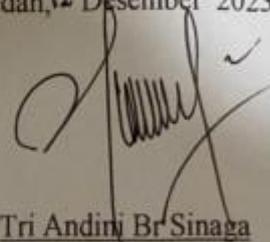
### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Zulkifli Sinaga  
Nama Ibu : Darmawati  
Alamat : Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab.  
Serdang Bedagai

### Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 163084 TEBING TINGGI
2. SMP MTS ALWASLIYAH TEBING TINGGI
3. SMA SWASTA F. TANDEAN TEBING TINGGI
4. Tahun 2019-2023, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 12 Desember 2023



Tri Andini Br Sinaga